

# PENDIDIKAN POLITIK

Tim Penulis:

Norbertus Tri Suswanto Saptadi

Agus Holid

Muhammad Reza Firmansyah

Ferdinandus Sampe

Wencislaus Sirjon Nansi

Asridiana

Erni Susilawati

Blasius Perang

Yuyun Fitriani



Editor : Andri Cahyo Purnomo

# **PENDIDIKAN POLITIK**

**Norbertus Tri Suswanto Saptadi  
Agus Holid  
Muhammad Reza Firmansyah  
Ferdinandus Sampe  
Wencislaus Sirjon Nansi  
Asridiana  
Erni Susilawati  
Blasius Perang  
Yuyun Fitriani**

# PENDIDIKAN POLITIK

## **Tim Penulis:**

Norbertus Tri Suswanto Saptadi  
Agus Holid  
Muhammad Reza Firmansyah  
Ferdinandus Sampe  
Wencislaus Sirjon Nansi  
Asridiana  
Erni Susilawati  
Blasius Perang  
Yuyun Fitriani

**Editor** : Andri Cahyo Purnomo, M.Pd., C.Ed.  
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : viii, 124  
**ISBN** : 978-623-8385-53-9  
**Terbit Pada** : Maret 2024  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih, karunia, penyertaan, kesempatan, keselamatan, dan rahmat berlimpah yang telah diberikan melalui kekuatan, semangat, keteguhan, kebijakan dan kesehatan sehingga seluruh rangkaian penulisan buku yang berjudul **“Pendidikan Politik”** telah selesai sesuai dengan harapan, waktu dan kesempatan yang telah diterima. Pengenalan dasar dalam pendidikan politik mempunyai 2 (dua) makna relevan yang terdiri dari kata “pendidikan” dan “politik”. Elaborasi dalam pengertian pendidikan politik akan membutuhkan pendefinisian formal terhadap makna dari pendidikan dan politik secara benar dan proporsional.

Secara etimologis, arti pendidikan bersumber dari bahasa latin, yaitu: *educare* berarti melatih. Pemahaman pada bidang pertanian (*agriculture*) mempunyai istilah *educere* yang bermakna mengolah tanah dan menyuburkan agar menjadi proaktif dan produktif. Pendidikan merupakan proses mengupayakan dalam menumbuhkan, meningkatkan, mematangkan, menata kelola, dan mengarahkan. Pendidikan sebagai proses peningkatan beragam potensi pada pribadi manusia agar menjadi berkembang secara positif dan berguna bagi diri dan lingkungan pembelajar.

Pendidikan politik menurut seorang Aristoteles adalah usaha mendayagunakan kapasitas (*skills*) pribadi dalam meraih format kehidupan sosial secara penuh melalui interaksi politik bersama orang lain. Interaksi berlaku dalam konteks kelembagaan yang didesain untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial dan meraih tujuan negara. Istilah politik menggambarkan ranah kehidupan di mana politik dalam kehidupan akan berkaitan dengan berbagai aspek kewenangan yang terdiri dari negara, kekuasaan, penentuan keputusan, kebijakan, hingga distribusi lokasi atau daerah.

Buku ini terdiri dari sembilan bab, yaitu: bab pertama tentang Pengenalan dan Konsep Dasar Pendidikan, bab dua tentang Pendidikan Nasional dan Politik Pendidikan, bab tiga tentang Sejarah dan Dinamika Pendidikan Politik di Indonesia, bab empat tentang Landasan, Ruang Lingkup, dan Tujuan Pendidikan Politik, bab lima tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Z, bab enam tentang Kurikulum dan Materi Pendidikan Politik, bab tujuh tentang Struktur, Jalur, dan Model Pendidikan Politik, bab delapan tentang Tantangan dan Hambatan Pendidikan Politik, bab sembilan tentang Hakikat Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Perguruan Tinggi.

Penulis sangat merasa berbahagia dan bergembira dengan penerbitan buku ini yang tentu sangat berharap banyak dapat membantu, berkontribusi dan memberikan inspirasi bagi para pembaca serta pemerhati pendidikan. Buku ini sangat perlu untuk dibaca, menjadi referensi dan dilaksanakan sebagai sarana untuk membangun komunikasi, meningkatkan wawasan, menambah pengetahuan, dan juga semangat dalam meningkatkan keberadaan. Buku ini sangat berguna dan relevan sebagai pemahaman dasar mengenai Pendidikan Politik bagi tenaga pendidik, peserta didik, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan masyarakat secara umum. Tak ada gading yang tak retak sehingga penulis berharap mendapatkan masukan, saran, dan sumbangan pemikiran untuk peningkatan dan kesempurnaan dalam penulisan buku ini.

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENGENALAN DAN KONSEP DASAR PENDIDIKAN POLITIK .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Konsep Dasar Politik.....	4
Landasan Pendidikan Politik.....	5
Fungsi dan Tujuan.....	8
Ranah Pendidikan Politik.....	9
Dinamika dan Tantangan.....	10
Penutup .....	12
Daftar Pustaka.....	14
Profil Penulis.....	15
<b>BAB 2 PENDIDIKAN NASIONAL DAN POLITIK PENDIDIKAN .....</b>	<b>16</b>
Pendahuluan .....	16
Contoh Kebijakan Pendidikan yang Dipengaruhi Oleh Politik .	18
Cara Mengatasi Kebijakan Pendidikan yang Tidak Efektif Karena Dipengaruhi Oleh Politik.....	19
Negara yang Berhasil Mengatasi Masalah Politisasi Dalam Pendidikan .....	20
Kesimpulan.....	26
Daftar Pustaka.....	28
Profil Penulis.....	29
<b>BAB 3 SEJARAH DAN DINAMIKA PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA.....</b>	<b>30</b>
Pendahuluan .....	30
Sejarah dan Dinamika Pendidikan Politik Indonesia Sepanjang Masa .....	30
Realitas Politik yang Tidak Sejalan dengan Pendidikan Politik	40
Daftar Pustaka.....	41
Profil Penulis.....	42
<b>BAB 4 LANDASAN, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK .....</b>	<b>43</b>

Landasan Pendidikan Politik.....	43
Sumpah Pemuda 1928 .....	45
Pancasila .....	45
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) .....	47
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).....	48
Ruang Lingkup Pendidikan Politik.....	49
Sistem Pemerintahan .....	49
Tujuan Pendidikan Politik.....	51
Daftar Pustaka.....	53
Profil Penulis.....	56
<b>BAB 5 PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI Z.....</b>	<b>57</b>
Pengantar.....	57
Tantangan Generasi Z di Era <i>Post Truth</i> .....	59
Urgensi Pendidikan Politik dalam Membangun Literasi dan Keadaban Politik Generasi Z di Era <i>Post Truth</i> .....	62
Kesimpulan .....	67
Daftar Pustaka.....	69
Profil Penulis.....	71
<b>BAB 6 KURIKULUM DAN MATERI PENDIDIKAN POLITIK.....</b>	<b>72</b>
Konsep Dasar Pendidikan Politik.....	72
Peran Pendidikan Politik dalam Masyarakat .....	75
Hubungan Antara Pendidikan dan Politik.....	78
Kurikulum Pendidikan Politik .....	79
Model Kurikulum Pendidikan Politik.....	82
Kesimpulan .....	84
Daftar Pustaka.....	85
Profil Penulis.....	86
<b>BAB 7 STRUKTUR, JALUR DAN MODEL PENDIDIKAN POLITIK...87</b>	<b>87</b>
Pendidikan Politik.....	87
Struktur Pendidikan Politik.....	89
Jalur Pendidikan Politik.....	90
Model Pendidikan Politik.....	92
Manfaat Pendidikan Politik.....	93
Simpulan .....	95
Daftar Pustaka.....	97
Profil Penulis.....	98

<b>BAB 8 TANTANGAN DAN HAMBATAN PENDIDIKAN POLITIK.....</b>	<b>99</b>
Pendahuluan .....	99
Politik Dalam Pandangan Masyarakat.....	100
Tantangan Pendidikan Politik sebagai Gagasan dan Tindakan Pemerintah.....	101
Tantangan-tantangan dalam Pendidikan Politik.....	102
Hambatan-Hambatan Dalam Pendidikan Politik .....	107
Daftar Pustaka.....	109
Profil Penulis .....	111
<b>BAB 9 HAKIKAT PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA MELALUI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI .....</b>	<b>112</b>
Pendahuluan .....	112
Hakikat Pendidikan Politik.....	113
Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula .....	117
Perguruan Tinggi sebagai Salah Satu Penyelenggara Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula.....	119
Daftar Pustaka.....	122
Profil Penulis .....	124

# BAB 1

## PENGENALAN DAN KONSEP DASAR PENDIDIKAN POLITIK

**Dr. Ir. Norbertus Tri Suswanto Saptadi, S.Kom., M.T., M.M., IPM.**  
Universitas Atma Jaya Makassar

### **Pendahuluan**

Pengenalan dasar dalam pendidikan politik mempunyai 2 (dua) makna relevan yang terdiri dari kata “pendidikan” dan “politik”. Elaborasi dalam pengertian pendidikan politik akan membutuhkan pendefinisian formal terhadap makna dari pendidikan dan politik secara benar dan proporsional. Secara etimologis, arti pendidikan bersumber bahasa latin, yaitu *educare* berarti melatih. Pemahaman pada bidang pertanian (*agriculture*) mempunyai istilah *educere* yang bermakna mengolah tanah dan menyuburkan agar menjadi produktif. Pendidikan merupakan proses mengupayakan dalam menumbuhkan, meningkatkan, mematangkan, menata kelola, dan mengarahkan. Pendidikan sebagai proses peningkatan beragam potensi pada pribadi manusia agar menjadi berkembang secara positif dan berguna bagi diri dan lingkungan pembelajar. (Rahman et al., 2022).

Pendidikan politik menurut seorang Aristoteles adalah usaha mendayagunakan kapasitas (*skills*) pribadi dalam meraih format kehidupan sosial secara penuh melalui interaksi politik bersama orang lain. Interaksi berlaku dalam konteks kelembagaan yang didesain untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial dan meraih

tinggi sehingga mampu merespon dinamika dalam menghadapi tantangan dan perkembangan bangsa dan negara.



**Gambar 1.5: Politik Pendidikan Masa Depan**

Sumber: <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/politik-pendidikan-masa-depan>.

## Penutup

Pengenalan dasar dalam pendidikan politik mempunyai 2 (dua) makna relevan yang terdiri dari kata “pendidikan” dan “politik”. Elaborasi dalam pengertian pendidikan politik akan membutuhkan pendefinisian formal terhadap makna dari pendidikan dan politik secara benar dan proporsional.

Konsep dasar pendidikan politik dapat dipahami dengan cara memformulasikan informasi yang perlu diketahui masyarakat agar menjadi efisiensi dan efektivitas bagi kehidupan manusia. Konsep politik merupakan rumusan dalam suatu konsep yang mereduksi informasi secara proporsional agar dapat ditangani. Konsep politik diterapkan melalui pendidikan politik secara transparan, akuntabel, dan sistematis.

Penerapan pendidikan politik di negara Indonesia berlandaskan nilai dalam Pancasila, UUD NRI 1945 dan Sumpah Pemuda 1928. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia dalam memahami jati diri dan cara pandangan hidup negara dan bangsa yang

dilakukan untuk melaksanakan pendidikan politik. Pancasila dan sumpah pemuda merupakan landasan dasar dalam implementasi nilai kebangsaan sehingga memberikan peluang bagi generasi muda untuk dapat mengetahui tata nilai diri serta memperoleh peningkatan potensi diri hingga mereduksi kelemahan yang terdapat pada setiap individu sehingga mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi secara menyeluruh.

Pendidikan politik merupakan upaya edukasi (*education*) melalui program pembinaan bagi setiap warga suatu negara untuk dapat mengetahui, memahami, dan mempunyai rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap keberadaan dari komponen bangsa dan negara. Pendidikan politik telah tertuang dalam Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda.

Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ranah pendidikan Politik mempunyai 3 (tiga) nilai, yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik. Dinamika politik menjadi langkah dalam menampilkan bentuk dan karakter demokrasi menuju tujuan berbangsa dan bernegara. Politik pendidikan di Indonesia berfokus kepada nilai dan cita-cita kemerdekaan yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa".

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Barlian, A.E.A. dan Herista, A.D.P. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa, *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), pp. 88–98. Available at: <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.
- Firdaus, A.R. dan Dewi, D.A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), pp. 184–191. Available at: <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1447>.
- Kemhan\_RI (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kewarganegaraan, T.A.D.P. dan (2020). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0*. Depok: Penerbit Gemala.
- Marsudi, K.E.R. dan Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic, *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), p. 111. Available at: <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2303>.
- Prasetio, T.A., Dewi, D.A. dan Furnamasari, Y.F. (2021). Urgensi Pendidikan Pancasila pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), pp. 8638–8643.
- Prayugo, A. dan Prayitno, R.B.P. (2022). Pendidikan Politik sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan, *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), pp. 427–442.
- Rahman, A. *et al.* (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan, *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), pp. 1–8.
- Sastrawati, N. (2021). Peran Negara Dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender, *Jurnal Sipakalebbi*, 5(1), pp. 90–107. Available at: <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v5i1.21563>.
- Sumanto, D. dan Haryanti, A. (2021). *Pendidikan Politik, Universitas Pamulang*. Tangerang: Unpam Press. Available at: <https://doi.org/10.46244/visipena.v7i1.299>.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Ir. Norbertus Tri Suswanto Saptadi, S.Kom., M.T., M.M., IPM.**

Lahir di Cirebon Jawa Barat, tanggal 7 Juni 1975. Memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala, Pembina Tingkat I (IV/b). Berpendidikan Sarjana Komputer (S.Kom.) di Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) tahun 1998, Magister Manajemen (M.M.) di Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun 2004, Magister Teknologi Informasi (M.T.) di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2007, Insinyur (Ir.) di Pendidikan Profesi Insinyur UNHAS tahun 2020, Insinyur Profesional Madya (IPM.) di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) tahun 2021, Doktor (Dr.) di Fakultas Teknik UNHAS tahun 2023, dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Lemhannas RI tahun 2020.

Menjadi tenaga pengajar (Dosen) pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM). Peraih Poster terbaik DPRM Dikti tahun 2016. Dosen berprestasi IKDKI tahun 2020 dan 2021. Pernah menjabat Kepala UPT Komputer, Kepala BAPSI, Wakil Dekan FT, Dekan FT dan FTI, Wakil Rektor III, Ketua Penjaminan Mutu. Tim PAK Dosen dan Asesor BKD UAJM. *Reviewer International Conference* dan Jurnal SINTA. Pemenang Hibah Kemdikbud Penelitian Dosen Pemula, Bersaing, Fundamental, dan Strategi Nasional. Penulis artikel media massa Tribun Timur, Koinonia, Bisnis Sulawesi, Sesawi.net, Mirifica.net, HidupKatolikCom, OMKNet, KatolikanaTV, Jalan Hidup Katolik, dll. Aktifis organisasi IKA Lemhannas RI LX, IARMI, DPP ISKA, BAPOMI Sulsel, LP3KD Sulsel, IKDKI SulSelTraBar, Komkep KAMS, Komsos KAMS, PUKAT KAMS, TPP KAMS, FMKI KAMS, UPS KAMS, Pengurus Kebun Sawit Laimbo, FDI, PII Makassar, Dewan Keuangan Paroki dan Program Ayo Sekolah Mariso, dll.

Email Penulis: [ntsaptadi@gmail.com](mailto:ntsaptadi@gmail.com).

# BAB 2

## PENDIDIKAN NASIONAL DAN POLITIK PENDIDIKAN

**Agus Holid, S.Pd.I., S.M.**  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

### **Pendahuluan**

Dalam masa depan yang penuh tantangan, pendidikan nasional dan politik pendidikan harus dilihat sebagai elemen utama yang saling terkait dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Pendidikan nasional merupakan faktor penting dalam membangun masa depan sebuah negara. Pendidikan yang berkualitas akan membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan global dengan kompetensi dan kemampuan yang memadai. Namun, pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan dari politik pendidikan. Politik pendidikan sangat mempengaruhi arah dan kebijakan dalam mendukung pendidikan nasional di sebuah negara.

Hubungan antara pendidikan nasional dan politik pendidikan: politik pendidikan berkaitan dengan pemilihan dan pengorganisasian kebijakan pendidikan oleh pemerintah. Kebijakan pendidikan tersebut akan menentukan arah pendidikan nasional di sebuah negara. Kebijakan yang bijak dan terintegrasi secara nasional akan membantu mencapai tujuan pendidikan yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin politik untuk memiliki pengaruh yang tepat dalam mengorganisasi pendidikan nasional, terutama dalam merumuskan program-program yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.

menentukan arah pembangunan individual dan bangsa secara keseluruhan. partisipasi masyarakat penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

Sebagai langkah awal, informasi dan mekanisme yang mudah diakses harus disediakan agar partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pendidikan dapat ditingkatkan. Dari sini, masyarakat dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat sistem pendidikan dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil di masyarakat. Kebijakan pendidikan selalu dipengaruhi oleh politik. Pemerintah dan partai politik yang berkuasa memiliki peran penting dalam memutuskan arah dan kebijakan yang diambil di bidang pendidikan. Maka dari itu, ada baiknya bagi kita semua untuk memahami bagaimana pengaruh politik dalam pembentukan kebijakan pendidikan, untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas sistem pendidikan di negara kita.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Agus Holid. dkk. (2024). *Revolusi Pendidikan: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*. Sada Kurnia Pustaka: Serang.
- A Fauzi. (2020). *Ilmu dan Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Fenomena*. repository.uinbanten.ac.id.
- AR Chaerudin, A Holid. (2020). *Analysis Of Family Hope And Family Welfare Program On Human Resources Beneficiaries Jurnal Ilmiah Niagara*.
- Asep imam Munandar. (2019). Kebijakan Politik Pendidikan Di Indonesia. *An-Nidhom Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(2):21
- Cham, M. Sam & Emzir. (2010). *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Jumani. (2011). *Implementasi Politik Pendidikan dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek*. Tesis Pascasarjana UMM.
- M Alfian Alfan, (2021). *Filosofi Pendidikan, Politik Pendidikan Masa Depan*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/politik-pendidikan-masa-depan>.
- M Asrori, (2015). Politik Dan Pendidikan (Tinjauan Historis Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia). *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2 No. 1 Juli-Desember 2015*.
- M Marzuki. (2012). Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 17, No.2, Oktober 2012: 16-38
- Muhammad Rifai. (2011). *Buku Teks Politik Pendidikan Nasional*. Penerbit Ar Ruzz Media: Yogyakarta.
- Sada Kurnia Pustaka <https://repository.sadapenerbit.com> › *catalog* › *book*.

## PROFIL PENULIS



### **Agus Holid, S.Pd.I., S.M.**

Ada sebuah ketertarikan Penulis menelusuri bidang Pendidikan Nasional Dan Politik Pendidikan, agar supaya penulis dapat mengimplementasikan keilmuannya dalam dunia Pendidikan dan Politik. Penulis menyelesaikan Pendidikannya pada SDN Kadikaran, MTs Negeri Ciruas, SMK Negeri 2 Serang, STAI Daarul Qalam Jakarta Jurusan Pendidikan Agama Islam lulus pada Tahun 2009, STIE Bina Bangsa Lulus 2019 setelah

Transisi menjadi Universitas Bina Bangsa Banten Konsentrasi pada Manajemen Sumber Daya Manusia, saat ini Penulis sedang menempuh studinya pada Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Program Magister Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

Penulis saat ini beraktivitas sebagai Pekerja Sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Serang. dan juga sedang menggagas Rumah Yatim (Mohon Do'a nya semoga lancar). Penulis beberapa kali mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada Balai-balai Besar seperti BBPPKS Bandung (Diklat Pendamping Sosial PKH, Diklat *Family Development Season*), BBPPKS Yogyakarta (Diklat Pendampingan Kelompok Usaha Bersama/KUBE), BBPPKS Padang (Diklat Pencegahan dan Penanganan *Stunting*, Sertifikasi Pekerja Sosial Program Keluarga Harapan). Penulis pun aktif pada Organisasi Kepemudaan dan Keagamaan seperti KNPI Kabupaten Serang, Himpunan Pemuda Al Khairiyah Kabupaten Serang, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Serang. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Serang, Pengurus SETARA Serang Banten.

Email Penulis: 232625104.agus@uinbanten.ac.id.

# **BAB 3**

## **SEJARAH DAN DINAMIKA PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA**

**Muhammad Reza Firmansyah, M.A.**  
Universitas Atma Jaya Makassar

### **Pendahuluan**

Pendidikan politik di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perubahan politik dan sosial budaya di negara ini sebagai bagian dari dinamikanya. Dengan mengikuti alur dan dinamika politik yang terjadi di Indonesia, maka setidaknya sejarah pendidikan politik di Indonesia dapat dibagi menjadi 8 fase penting dari era kolonial belanda hingga pada saat ini.

### **Sejarah dan Dinamika Pendidikan Politik Indonesia Sepanjang Masa**

Pada masa kolonial Belanda, perjuangan melawan penjajahan memunculkan kesadaran akan pentingnya pemahaman politik untuk mencapai kemerdekaan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, pendidikan politik diarahkan untuk membangun kesadaran nasionalisme dan kewarganegaraan. Lebih lanjut lagi, selama era orde baru di bawah pemerintahan Soeharto, pendidikan politik disusun untuk mendukung ideologi pemerintah, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

## Daftar Pustaka

- Ferguson, S. (2013). *The Voter Education Program: Growing a Demand for Good Governance*. ANU Press Colaborating JSTOR, 35-55.
- Handoyo, Eko & Lestari, Puji. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Labolo, M. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Saefulloh, Aep. (2008). *Perjalanan Politik Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia.
- Soebardjo, Ahmad. (1977). *Lahirnya Republik Indonesia*. Jakarta: PT Kinta.
- Soeroto. (1982). *Sejarah Proklamasi*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Sunarso. (2021). *Politik Pendidikan Tiga Rezim*. Surakarta: Indotama Solo.
- Suryadi, A & Somantri. (2000). Pemikiran Kearah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. *Paper The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education March 29, 2000*: Bandung.
- Susetyo, Benny. (2005). *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Tirtoprojo, Susanto. (1980). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Yasdin. (2017). *Analisis Politik Pendidikan Kejuruan di Provinsi Sulawesi Selatan*. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Reza Firmansyah., M.A.**

Penulis adalah dosen pada Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Atma Jaya Makassar dan pernah juga tercatat sebagai pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dengan status dosen luar biasa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan yang sama yaitu Psikologi di Universitas Negeri Makassar dan melanjutkan Program Magister Sains Psikologi Sosial di Universitas Gadjah Mada. Karier akademiknya berfokus pada pendidikan dan penelitian dengan minat utama Psikologi Politik, kelompok dan relasi interpersonal. Sebagai akademisi, penulis juga gemar melakukan penelitian dengan tema penelitian yang relevan dalam bidangnya seperti; orientasi dominasi sosial, identitas sosial, prasangka, dan juga tema-tema relasi interpersonal seperti; relasi pertemanan, relasi dosen-mahasiswa, *romantic relationship*, dan isu-isu kepercayaan. Beberapa riset dilakukan secara kolaboratif dan dipresentasikan dalam kegiatan lokal hingga internasional, selain itu hasil karya lainnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal hingga artikel populer yang terbit di media massa. Hingga kini Penulis masih berperan aktif dalam melakukan kegiatan pendidikan dan riset serta penulisan-penulisan ilmiah lainnya dalam bidang psikologi sosial.

Email Penulis: [reza\\_firmansyah@lecturer.uajm.ac.id](mailto:reza_firmansyah@lecturer.uajm.ac.id).

# BAB 4

## LANDASAN, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK

**Ferdinandus Sampe, S.E., M.Bus., Ph.D.**  
Universitas Atma Jaya Makassar

### **Landasan Pendidikan Politik**

Politik merupakan serangkaian aktivitas yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, atau bentuk hubungan kekuasaan lainnya antar individu, seperti distribusi sumber daya atau status. (Ghofur & Shabir, 2020). Sementara, pendidikan politik merupakan tindakan atau proses menanamkan atau memperoleh pengetahuan umum, mengembangkan kekuatan penalaran dan penilaian, dan secara umum mempersiapkan diri sendiri atau orang lain secara intelektual untuk kehidupan bermasyarakat yang dewasa. (Graizbord & Souza Leão, 2023). Jadi pada dasarnya, pendidikan politik merupakan proses menanamkan atau memperoleh pengetahuan atau keterampilan berpartisipasi dalam sistem penatalaksanaan kehidupan bermasyarakat.

Untuk memahami sepenuhnya dasar-dasar pendidikan politik, penting untuk mempelajari konteks sejarah yang telah membentuk sistem dan ideologi politik dari waktu ke waktu. (Farida & Wijaningsih, 2019). Memahami evolusi pemikiran politik, dari peradaban kuno hingga negara-bangsa modern, memberikan

## Daftar Pustaka

- Abdulkarim, A., Komalasari, K., Saripudin, D., Ratmaningsih, N., & Anggraini, D. N. (2020). Development of a unity in diversity-based Pancasila education text book for Indonesian universities. *International Journal of Instruction*, 13(1), 371–386. Scopus. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13125a>.
- Abra, E. H., & Wahanisa, R. (2020). The Constitutional Court Ultra Petita As A Protection Form Of Economic Rights In Pancasila Justice. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 187–224. Scopus. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35965>.
- Adib, S., Hidayati, M., Azhar, M., Jubba, H., & Qodir, Z. (2024). *Identity Politics in Indonesian Authors: Bibliometric Analysis and Visualization*. 696 LNNS, 897–905. Scopus. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-3236-8\\_72](https://doi.org/10.1007/978-981-99-3236-8_72).
- Asavei, M. A. (2020). Art, Politics and Religion in (Post-)Communist Romania: An Introduction. In *Modernity, Memory and Identity in South-East Europe* (pp. 1–34). Scopus. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-56255-7\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-56255-7_1).
- Aziz, S. (2017). Design building of Indonesian Economic Politics. *European Research Studies Journal*, 20(3), 907–921. Scopus.
- Benawa, A., & Sihombing, A. A. (2023). *The Significance Influence of Pancasila Education and Religion Education on the Formation of Pancasila Student Profile by Hybrid Learning*. 426.
- Benawa, A., Lusia, E., Alwino, A., Irawan, I., & Witono, P. H. (2022). *The Influence of Pancasila Education and Religion Education on Value Education for the Students during COVID-19 Pandemic (Case Study: Bina Nusantara University Students)*. 119–124. Scopus. <https://doi.org/10.1145/3545801.3545818>.
- Casmana, A. R., Hisyam, C. J., & Wardatussa'idah, I. (2022). Integrating Character Education Into the RECE Learning Model Through Pancasila and Citizenship Education Subjects. *Frontiers in Education*, 7.

- E. (2021). Economic and Political Factors That Influenced Indonesian Pressing the Era of New Order Regime. *Review of International Geographical Education Online*, 11(3), 1227–1236.
- Farida, E., & Wijaningsih, D. (2019). Politics And Legal Philosophy Of Indonesian Migrant Worker Protection: Case Study In Malaysia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 2002–2004.
- Fearnley-Sander, M., Effendi, Z. M., Basri, W., & Gistituati, N. (2001). Political learning during Reformasi. *Australian Journal of Political Science*, 36(2), 325–345.
- Ghofur, A., & Shabir, M. (2020). Politics Of Law Of The Protection Of Plant Variety (PVT) And Its Implications For Food Security In Indonesia: A Maqashid Al-Shari’ah Perspective. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 4805–4814.
- Głab, K. M. (2020). The Culture of Pancasila. An Indonesian Concept That Fuses The Impossible. *Acta Asiatica Varsoviensia*, 2020(33), 5–21.
- Gonschorek, G. J. (2023). *The Political Economy Of Redistribution In Indonesia: Political Patronage And Favoritism In Intergovernmental Fiscal Transfer Allocations* (p. 184). Scopus. <https://doi.org/10.4324/9781003302865>.
- Graizbord, D., & Souza Leão, L. D. (2023). The Political Work of “Culture” in Struggles to Reform the Mexican State. *Politics and Society*, 51(4), 567–596. Scopus. <https://doi.org/10.1177/00323292221106906>.
- Lailam, T., & Anggia, P. (2023). The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 19(1), 110–127. Scopus. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.54087>.
- McBeth, M. K. (2022). Coddled or Engaged? Teaching Political Tolerance to Generation Z Students. *Journal of Political Science Education*, 18(4), 438–454.

- Nakanishi, Y. (2023). Politics-Based Knowledge Legitimation Model: Power Exercise In Organizational Learning. *Learning Organization*, 30(3), 273–289.
- On Of Politicians On Instagram: What Generation Z Wants To See In Political Posts. *Information Communication and Society*, 26(9), 1773–1788.
- Parinduri, R. A. (2019). Does Education Increase Political Participation? Evidence From Indonesia. *Education Economics*, 27(6), 645–657.
- Ricks, J. I. (2022). The Politics Of Institutional Reform: Vulnerability And Bureaucratic Independence In Southeast Asian Agriculture. *Asian Politics and Policy*, 14(3), 351–373.
- Sukarno, A. (2018). Indonesian independence and Pancasila. In *Southeast Asian History: Essential Readings* (pp. 164–172).
- Yunaldi, W. (2020). The Dynamic Interpretation of Pancasila in Indonesian State Administration History: Finding Its Authentic Interpretation. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 39–55.
- Zhai, Y. (2022). *Research on Artificial Intelligence System Design of Ideological and Political Education*. 298, 177–185. Scopus. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-2452-1\\_18](https://doi.org/10.1007/978-981-19-2452-1_18).

## PROFIL PENULIS



### **Ferdinandus Sampe, S.E., M.Bus., Ph.D.**

Penulis adalah Dosen Manajemen pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Makassar. Pendidikan formal S1, pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin; S2 pada *Graduate College of Business, Southern Cross University, Australia* dengan beasiswa *Australian Development Scholarship*; S3 pada *School of Commerce and Management, juga Southern Cross University* dengan beasiswa Luar Negeri DIKTI dan tahun ke-4 mendapatkan *International Postgraduate Research Scholarship* dari pemerintah Australia.

Penulis juga telah menerbitkan sejumlah jurnal internasional dan *book chapter*. Dalam lingkungan kampus Universitas Atma Jaya Makassar, Penulis pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Bahasa Universitas Atma Jaya Makassar, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Manajemen, Dekan Fakultas Ekonomi dan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar masa bakti 2017-2021. Di luar lingkungan kampus, penulis juga pernah menjadi anggota Tim Ahli Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Tim Peneliti Sistem Drainase Kota Makassar dan pernah memenangkan penelitian fundamental dan terapan dari Ristek Dikti/Kemendikbud. Saat ini penulis sedang melaksanakan hibah *Direct Aid Program* dari Pemerintah Australia di Tanah Toraja.

Email Penulis: [ferdisampe1404@gmail.com](mailto:ferdisampe1404@gmail.com).

# BAB 5

## PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI Z

**Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.**  
Universitas Atma Jaya Makassar

### **Pengantar**

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Sebagai negara demokrasi besar, rakyat merupakan tumpuan kekuatan sesungguhnya, bukan pada pemerintahannya ataupun juga pada sumber daya alam yang kaya. Pada setiap negara dengan sistem demokrasi, warga negara yang menjadi penentu mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin dan mengatur kehidupan bersama. SDM merupakan modal besar dalam sebuah negara demokrasi karena akan faktor determinan bagaimana masa depan pemerintahan yang akan berlangsung serta gambaran masa peradaban suatu bangsa. (Pasaribu, 2017: 51-59).

Sebagai salah satu negara demokrasi besar tersebut, Indonesia tentunya membutuhkan keterlibatan aktif semua komponen bangsa, sehingga tujuan berbangsa dan bernegara, yakni kesejahteraan, keadilan serta kebaikan bersama dapat terwujud. Keterlibatan itu dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya bentuknya yakni mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat dengan cara mengambil bagian dalam proses politik seperti Pemilu dan mengawal serta mengontrol hasil-hasil Pemilu. Politik adalah cara dan sarana untuk merawat dan mempertahankan demokrasi. Dengan berpolitik yang berkualitas, maka demokrasi yang bermartabat pun akan terus terawat dan terjaga.

Selain itu Pendidikan politik bermaksud meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami situasi politik masyarakat serta mampu memperjuangkan kepentingan bersama (*bonum commune*). Praksis pendidikan dan literasi politik bagi generasi Z saat ini merupakan sebuah upaya nyata di tengah banyak ketidakpastian sebagai produk dari era *post truth* saat ini. Kaum muda merupakan harapan dan calon pemimpin bangsa kedepan. Oleh karena itu, generasi muda harus dibangun kesadaran untuk terlibat dalam sistem politik berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik menjadi penting karena dengan cara inilah kelangsungan suatu sistem politik dan demokrasi yang berkualitas dapat dipertahankan.

Tujuan utama pendidikan politik adalah agar setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang diterapkan. Setiap individu tidak sekedar memahami politik, tetapi juga memiliki kesadaran etis politik untuk mampu memikul tanggung jawab sebagaimana dimaksud melalui perubahan sikap dan peningkatan tingkat partisipasi dalam dunia politik. Oleh karena itu pendidikan politik bagi generasi Z menjadi tanggung semua pihak khususnya negara dan pemerintah, partai politik serta institusi pendidikan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Back, H., Teorell, J., & Westholm, A. (2011). Explaining Modes of Participation: a Dynamic Test of Alternative Rational Choice Models. *Journal Scandinavian Political Studies*, 34(1), 2011, 74-97.
- Bourne, P.,A (2010). Modelling Political Trust in a Developing Country Current. *Research Journal of Social Sciences* 2(2): 84-98.
- Cevi Mochamad Taufik & Nana Suryana. (2020). *Media, Kebenaran, dan Post-Truth*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Dahrendorf R. (2003). The Challenge for Democracy. *Journal of Democracy*. 14 (4) 2003.
- Eri Deka Gustiar. (2023). Political Education As A Foundation For Development: Educational Systems, Strategies And Techniques, *IJEVSS*, Volume 02 Issue 01.
- Futuhul, N., & Fuad, A. J. (2020). *Dampak Post-Truth di Media Sosial*.
- Haryatmoko. (2019). Mencari Kebijakan di Era Post-Truth: Menghadapi Hoaks, Emosi Sosial dan Populisme Agama, *Majalah Basis: Nomor 05-06, Tahun ke-68*.
- Hermawan, Candra, Iyep. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan* 10(1).
- <https://data.goodstats.id/statistic/pierrerainer/sensus-bps-saat-ini-indonesia-didominasi-oleh-gen-z-n9kqv>.
- <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/939>.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7198230/10-negara-demokrasi-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>.
- Juditha, Christiany, and Josep J. Darmawan. (2010). Use of Digital Media and Millennial Generation's Political Participation. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 22(2).
- Kartono, Kartini. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Marijan, Kacung. (2016). *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Marz Wera. (2020). Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial, Dan Populisme Agama, *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* □Vol. 07, No. 1.
- Pasaribu, P., (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5 (1).
- Rafni, A., and S. Suryanef. (2019). Continuing Political Education: Learning through Smart House Elections. *In Research for Social Justice*, Routledge.
- Salman, Saputra, D. H., & Wardana, R. W. (2019). Media Sosial dan Masyarakat Baru di Post Truth Era. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 6(2).
- Setiawan, Ikhwan. (2017). Media Sosial, Politik Post-Truth dan Tantangan Kebangsaan. Link berita: <http://matatimoer.or.id/2017/09/25/media-sosial-politik-post-truthdan-tantangan-kebangsaan/>.
- Setyo Wibowo, (2019). Meneropong Bohong à la Post-Truth, *Majalah Basis*, Nomor 05-06, Tahun ke-68.
- Suharyanto, C. E. (2019). Analisis Berita Hoaks Di Era Post-Truth: Sebuah Review. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10(2), <https://doi.org/10.17933/mti.v10i2.150>.
- Teorell, J., Torcal, M., & Montero, J.R.(2007). Political Participation: Mapping the Terrain. Dalam J. W. Deth., J. R. Montero & A. Westholm (Eds). *Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis*. London and New York: Routledge.
- Zorn, Robert L. (2017). Coming in 2017: A New Generation of Graduate Students-The Z Generation. *College and University; Washington* 92(1): 2017. <https://www.proquest.com/docview/1901673866>.

## PROFIL PENULIS



### **Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.**

Lahir Di Manggarai, Flores- Nusa Tenggara Timur, 5 April 1982. SMP dan SMU Seminari Menengah Pius XII Kisol (1995- 2001) Manggarai Flores NTT. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar selesai tahun 2006 dan melanjutkan S2 Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012.

Penulis aktif melakukan penelitian dengan memenangkan hibah pendanaan DIKTI yakni skema dosen pemula (Tahun 2012 dan 2013), Penelitian hibah bersaing (Tahun 2015 dan 2016), hibah penelitian MBKM (Tahun 2021) serta mendapat Hibah Yayasan BaKTI yang bekerjasama dengan AusAid (Tahun 2012). Selain itu aktif juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai Universitas Atma Jaya Makassar.

Hasil Penelitian telah banyak dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi Sinta serta tahun 2021 menerbitkan satu buku dengan judul: Urgensitas CSR Terhadap Pencegahan Kejahatan Korporasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum (2014-2023) dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar (2023-2027). Selain di kampus, penulis juga aktif pada organisasi di luar kampus yakni sebagai Anggota Ikatan Sarjana Katolik Indonesia DPD Sulsel, Pengurus *Vox Point* Indonesia DPD Sulsel, Anggota Pembina PMKRI Cabang Makassar, serta pengurus Kerukunan Keluarga Besar NTT-Sulawesi Selatan.

# BAB 6

## KURIKULUM DAN MATERI PENDIDIKAN POLITIK

**Asridiana, S.IP., M.PA.**

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan  
Kajian Hukum Administrasi Negara LAN RI

### **Konsep Dasar Pendidikan Politik**

#### **1. Definisi Pendidikan Politik**

(Prayugo & Prayitno, 2022) pendidikan adalah suatu usaha untuk mengubah sikap dan perilaku sesuai dengan ekspektasi. Pelaksanaan pendidikan harus dilaksanakan secara terorganisir, terencana dan berkesinambungan guna mengembangkan manusia menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna, dewasa dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai budaya dan ideologi, hati nurani dan tanggung jawab. Pendidikan harus diberikan secara berkesinambungan, karena pendidikan bukan hanya suatu proses yang berlangsung tidak hanya di sekolah dan lembaga saja, melainkan juga di luar sekolah dan lembaga, termasuk di lingkungan kerja dan tempat tinggal, termasuk di lingkungan rumah. Politik menyangkut negara, termasuk masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, serta distribusi nilai dan norma dalam masyarakat.

Pendidikan politik adalah suatu konsep yang mencakup serangkaian kegiatan dan proses pembelajaran yang bertujuan

Teknologi juga memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi politik terkini, memperbarui materi pembelajaran secara *real-time*, dan merangsang keterlibatan siswa dalam diskusi daring.

#### **4. Pendidikan Karakter dan Etika Politik**

Pendidikan politik yang holistik harus mencakup pembentukan karakter dan etika politik. Model kurikulum ini menekankan pada nilai-nilai demokratis, integritas, dan tanggung jawab warga negara. Siswa tidak hanya diajak untuk memahami teori politik, tetapi juga dibimbing untuk mengembangkan sikap etis dalam berpolitik. Hal ini menciptakan landasan kuat bagi pembentukan pemimpin masa depan yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi.

#### **5. Pembelajaran Berbasis Proyek**

Pembelajaran berbasis proyek menjadi salah satu komponen penting dalam model kurikulum pendidikan politik. Siswa diberikan proyek-proyek penelitian, simulasi pemilihan umum, atau tugas-tugas yang mendorong keterlibatan aktif. Melalui proyek-proyek ini, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam situasi nyata, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memperkuat keterampilan kolaborasi.

#### **6. Pelibatan Masyarakat**

Model kurikulum pendidikan politik yang efektif juga memperkuat keterlibatan masyarakat. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan tokoh-tokoh politik lokal memungkinkan siswa mendapatkan wawasan praktis tentang dinamika politik di lapangan. Melalui diskusi, lokakarya, atau kunjungan lapangan, siswa dapat menghubungkan teori politik dengan implementasinya dalam masyarakat.

#### **7. Evaluasi dan Pembaruan Berkala**

Model kurikulum pendidikan politik juga memasukkan sistem evaluasi yang berkelanjutan dan pembaruan berkala. Dengan mengevaluasi efektivitas kurikulum secara reguler, sekolah atau lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi area perbaikan dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan terkini dalam politik dan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Model kurikulum pendidikan politik yang holistik dan progresif bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal, mendorong perkembangan warga negara yang sadar politik, aktif, dan berintegritas. Melalui pendekatan terpadu, penguatan literasi politik, penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis proyek, dan keterlibatan masyarakat, model ini menjadi landasan yang kokoh dalam membentuk generasi penerus yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap demokrasi dan perkembangan bangsa. Dengan fokus pada evaluasi dan pembaruan berkala, model ini tetap relevan dan responsif terhadap perubahan dalam dinamika politik dan kebutuhan masyarakat.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1), 60–68. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766>.
- Budiardjo, M. (n.d.). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (M. Riyadh (ed.); Revisi). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatma Sjoraida, D., & Ruchiat Nugraha, A. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan Politik Melalui Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(2), 104–111. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i2.20>.
- Funome, P., Hardiyanto, W., & Setyawan, D. (2012). Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 1(2), 42377.
- Hartono, S. (1986). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. 2(2), h.10.
- Kusmanto, H. (2014). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1), 78–90. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Lubis, C. T. I. (2023). Penanaman Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Serentak 2024. *Jurnal Bakti Sosial*, 2(1), 36–43.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan ...*, 3(3), 427–442. <http://jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/138%0Ahttps://jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/download/138/111>.
- Sasana Tunggal. (2023). Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.9>.

## PROFIL PENULIS



### **Asridiana, S.IP., M.P.A.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu politik dan pemerintahan dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke salah satu kampus swasta di Yogyakarta yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan memilih Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan berhasil lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan master ke Universitas Gadjah Mada menyelesaikan studi S2 di prodi MAP UGM pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja sebagai salah satu Widyaiswara Ahli Muda Di Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara. Selain sebagai PNS di Puslatabang KHAN, penulis juga ikut mengajar sebagai dosen tetap berstatus NIDK di salah satu kampus swasta di provinsi aceh yakni STISIP Al-Washliyah dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Email Penulis: [asridiana92@gmail.com](mailto:asridiana92@gmail.com).

# BAB 7

## STRUKTUR, JALUR DAN MODEL PENDIDIKAN POLITIK

**Erni Susilawati, S.Pd., M.Pd.**

TK Nurani Bandung

### **Pendidikan Politik**

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Menurut Eko Handoyo (2017:6) mengatakan bahwa kaitan antara pendidikan dan politik terwujud dalam bentuk-bentuk yang berbeda, sesuai karakteristik dan kematangan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga masyarakat dapat bersikap dan bertindak lebih bijak dalam menjalani kehidupan berpolitiknya.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam hal sistem politik, pemerintahan, serta isu-isu politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Tujuan dari pendidikan politik adalah menciptakan warga negara yang berpengetahuan, kritis, dan aktif dalam proses demokrasi. Pendidikan politik dapat didukung oleh beberapa aspek, meliputi:

menilai informasi politik dengan bijak, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Selain itu, pendidikan politik dapat membangun keterlibatan masyarakat sipil dan memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Dalam bidang ilmu negara haruslah terkait dengan istilah ilmu politik untuk membangun dasar-dasar pembenaran tindakan dari penguasa.

Secara keseluruhan, pendidikan politik memiliki dampak yang positif dalam membentuk masyarakat yang sadar, kritis, dan aktif dalam proses politik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas politik, meminimalkan ketegangan sosial, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu diperkuat dan diperluas untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi kompleksitas dunia politik modern.

Pendidikan politik merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari berbagai konsep, nilai-nilai, simbol dan norma-norma politik.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, A.D. (1989). *Ilmu Negara*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Handoyo, E. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Riadi, M. (2020). *Pendidikan Politik*. [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com).
- Warlim, H. (2019). *Pendidikan Pancasila*. Tim Penyusun MKU Pendidikan Pancasila.
- [www.researchgate.net/publication](http://www.researchgate.net/publication). (2020). *Pendidikan Politik (Pengertian, Fungsi, Bentuk dan Hambatan)*.

## PROFIL PENULIS



### **Erni Susilawati, S.Pd., M.Pd.**

Pendidikan suatu bidang yang menarik bagi penulis. Meskipun penulis awalnya tidak memasuki jenjang pendidikan namun keinginan untuk mengajar tetap dilakukan penulis seperti menjadi guru les dll. Sejak penulis masuk SMKN 1 Bandung Jurusan Akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 1992. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2008 dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2018, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Pendidikan Dasar Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka dan lulus pada tahun 2021. Pada saat ini penulis melanjutkan pendidikan S3 Prodi Ilmu Pendidikan Islam Program Doktorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis memiliki jiwa kecintaan terhadap pendidikan dan dengan berpedoman belajar sepanjang hayat, penulis berkolaborasi dengan berbagai bidang pendidikan. Pada saat ini, penulis bertugas sebagai Kepala Sekolah TK Nurani di Kecamatan Arjasari dan penulis pun aktif sebagai ketua PKG PAUD kecamatan Arjasari. Berbekal pengalaman sebelumnya, penulis bekerja sebagai sekretaris salah satu perusahaan di Bandung, sehingga penulis mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam membantu melaksanakan tugas-tugas dari dinas pendidikan.

Email Penulis: [ernisusilawati349@gmail.com](mailto:ernisusilawati349@gmail.com).

# BAB 8

## TANTANGAN DAN HAMBATAN PENDIDIKAN POLITIK

Fr. Blasius Perang, CMM., S.S., MA.Psy.  
Universitas Atma Jaya Makassar

### Pendahuluan

Masalah kehidupan dan kematian seperti perang dan perdamaian dibentuk oleh ideologi dan keputusan politik. Hukum dan perundang-undangan transaksi ekonomi, nilai-nilai masyarakat dan cara orang-orang dari berbagai negara berinteraksi satu sama lain semua melibatkan pengaruh politik. Ide-ide kontroversial tentang apa yang benar dan salah dan identifikasi budaya yang membentuk gagasan orang tentang siapa mereka mencerminkan kesetiaan politik. Untuk itu, pendidikan politik itu penting dipahami.

Pendidikan politik merupakan sebuah telaah komprehensif yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang mendorong individu untuk menciptakan kebaikan bersama (*bonum commune*). Kebaikan bersama yang dicita-citakan semua orang menjadi tujuan masyarakat yang mampu menumbuhkan kesadaran, keterlibatan semua komponen untuk mewujudkannya. Ini adalah idealisme yang mestinya ada dan terjadi, namun ada begitu banyak tantangan dan hambatan untuk mewujudkannya. Pada bab ini, kita akan melihat secara detail apa yang menjadi tantangan dan hambatan pendidikan politik.

## 8. Intoleransi Politik

Di tahun politik, ketidaktoleranan menghalangi kebhinekaan. Rasa tidak menghargai ini cukup untuk menyebabkan perpecahan. Perbedaan suku dan budaya adalah dasar bangsa Indonesia. Keutuhan NKRI, yang selama ini diperjuangkan dengan keras, dapat diancam oleh intoleransi. Sikap intoleransi terhadap pandangan politik yang berbeda dapat menghambat diskusi dan pertukaran ide dalam pendidikan politik.

## Hambatan-Hambatan Dalam Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah upaya sistematis untuk mendidik masyarakat sehingga mereka mencintai dan menghargai bangsa dan negara serta menghayati prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem politik agar mereka mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik yakni kebaikan bersama. Namun, ada beberapa hambatan yang dapat untuk meraih tujuan tersebut.

### 1. Kurangnya Kesadaran Individu akan Pentingnya Politik

Sejatinya, politik itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bersama sebagai masyarakat. Masyarakat perlu menyadari pentingnya mengetahui dan memahami politik sehingga mereka bisa memberikan kritikan dan masukan yang konstruktif. Namun, banyak individu mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya partisipasi politik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari.

### 2. Keterbatasan Sumber Daya

Pendidikan politik bertujuan untuk membantu masyarakat menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan berpartisipasi dalam membangun sistem politik demokratis. Namun, banyak program pendidikan politik menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya, personel, atau dana, yang membatasi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan dan target. Kekurangan lainnya adalah minimnya referensi yang digunakan sehingga tidak memperluas spektrum pengetahuan guru dan siswa. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah membuat guru kesulitan dalam mengembangkan media pendidikan politik.

### **3. Isi Kurikulum yang Tidak Relevan**

Kurikulum pendidikan politik mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat saat ini, atau mereka mungkin tidak memperhatikan perubahan yang terjadi dalam dunia politik. Salah satu topik yang sangat penting adalah pendidikan politik. Namun, masih ada siswa yang tidak peduli, tidak tertarik, dan tidak tertarik dengan subjek ini. (Muhammad, T.F. 2022).

### **4. Kondisi Politik yang Tidak Stabil**

Di negara-negara yang mengalami konflik atau ketidakstabilan politik, implementasi program pendidikan politik dapat menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Jika situasi politik tidak stabil maka akan melumpuhkan banyak dimensi negara dan bangsa baik ekonomi, politik, pertahanan keamanan, dll.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Eri Deka Gustiar, Kasful Anwar US, & As'ad Isma. (2023). Political Education As A Foundation For Development: Educational Systems, Strategies And Techniques. *International Journal of Education, Vocational and Social Science*, 2(01), 50-59. <https://doi.org/10.99075/ijevss.v2i01.138>.
- Fernández-Soria, J. (2013). Problems And Challenges For The Politics Of Education Before The Change Of Prominence Experienced By Educational Actors. *Journal Of New Approaches In Educational Research*, 2(2), 63-71. doi: <https://doi.org/10.7821/naer.2.2.63-71>.
- Herita, Dewi, (2016). Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. Dalam <https://sumbarprov.go.id/home/news/8277-perempuan-dan-politik-dalam-perspektif-kesetaraan-gender>. Retrieved 5 February 2024.
- <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5029165/penyandang-disabilitas-di-indonesia-masih-mengalami-keterbatasan-keadilan-politik>.
- Irvanus Destavino, Muhammad Habibi, Muh. Reza Syamsuri, (2023). Navigating Digital Deception: Unmasking Propaganda and Disinformation in the 2024 Elections. *The Journalist: Social and Government*. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.564>. Hal. 380-388.
- Malik, I., Khaerah, N., Prianto, A., & Hamrun, H. (2020). Edukasi Politik Virtual Era Demokrasi Digital Pada Sekolah Menengah Kejuruan. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2), 39-47. doi:<https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.14>.
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11 (1), 1-22. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>.
- Mindzie, M. A. (2015). Challenges to Political Participation. In Building Peace and Development in the Sahel: Enhancing the Political Participation of Women and Youth (pp. 3-8). *International Peace Institute*. <http://www.jstor.org/stable/resrep09525.5>.
- Muhammad Tegar Fredy, Al Rafni, Suryanef, Irwan, (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik di SMAN 4 Kerinci Melalui

- Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Journal of Civic Education*, (ISSN: 2622-237X). Volume 5 No. 2 2022.
- Pacho, Titus. (2014). Necessity Of Political Education. *International Journal of Innovative Research & Studies*. 3. 10-17.
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Press.
- Thomas Carothers & Andrew O'Donohue, (2019). *Political Polarization In South And Southeast Asia*. Brookings Institution Press.
- Weber, T. J., Hydock, C., Ding, W., Gardner, M., Jacob, P., Mandel, N., Sprott, D. E., & Van Steenburg, E. (2021). Political Polarization: Challenges, Opportunities, and Hope for Consumer Welfare, Marketers, and Public Policy. *Journal of Public Policy & Marketing*, 40(2), 184-205. <https://doi.org/10.1177/0743915621991103>.

## PROFIL PENULIS



**Fr. Blasius Perang, CMM, S.S., MA.Psy.**

Penulis berasal dari Kabupaten Manggarai dan berdomisili di Makassar. Penulis merupakan Dosen Psikologi pada Program Studi Psikologi Universitas Atma Jaya Makassar sejak 2021. Tamatan Psikologi Klinis dari University of Santo Tomas Manila 2015 sebelumnya mengabdikan sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar sejak 2015-2020. Saat ini menjadi anggota tetap *pada Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis (Frater CMM)* yang berpusat di Negeri Belanda. Di samping bekerja sebagai dosen juga melayani hipnoterapi bagi mereka yang mengalami masalah-masalah psikologis dan aktif dalam karya-karya sosial.

# **BAB 9**

## **HAKIKAT PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA MELALUI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI**

**Yuyun Fitriani, S.A.N., M.Si.**  
STISIPOL Dharma Wacana Metro

### **Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari salah satu unsur penting yakni pemilih pemula. Menurut UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwa pendidikan politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menjalankan kehidupan politik demokratis. Pendidikan politik ini sesungguhnya dapat dilakukan oleh institusi pendidikan melalui perguruan tinggi dan partai politik itu sendiri.

Penyelenggaraan pendidikan politik melalui perguruan tinggi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yakni pada mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan keilmuan politik seperti pendidikan kewarganegaraan, pengantar ilmu politik, sistem politik Indonesia dan lain sebagainya. Sementara itu, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni

## Daftar Pustaka

- Fauzi, H. (2023). Budaya Politik Pemilih Milenial (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020). *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 89–94. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.98>.
- Hasyim, A., & Azkia, S. S. S. (2023). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 187–200. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>.
- Hasyim, B., Sartibi, N., & Shiddiq Fauzan, H. (2020). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Budaya Dan Masyarakat*, 1(1), 1–6. [www.lanmas.fisip.uniga.ac.id](http://www.lanmas.fisip.uniga.ac.id).
- Indrawan, Jefri. (2019). *Pengantar Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islah, K., Juardi, J., & Nasim, E. S. (2020). Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 46–50. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i1.969>.
- Kartono. Kartini. (1996). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Bandung: CV. Rajawali.
- Khoiron, M. Nur. (1999). *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja)*. Yogyakarta: IKIS.
- Kuntowijoyo. (1994). *Demokrasi & Budaya Demokrasi*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Kuswati, Y. (2019). Penyuluhan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Karang Taruna Kecamatan Panyingkiran. *Jurnal PARAHITA ABDIMAS*, 1(1), 52–62. <https://ejournalunma.ac.id/index.php/parahita>.
- Lawani, U. S., Ismail, R., Lukoting, F., Prodi, S., Universitas, P., Gorontalo, N., Gorontalo, B. K., Boalemo, B. K., Kabupaten, B., & Utara, G. (2023). Pendidikan Politik Dalam Membangun Kesadaran Demokrasi Pemilih Pemula Jelang Pemilu 2024 Abstract: Abstrak: *JP: JURNAL POLAHI*, 1(1), 23–33.
- Ramdhani, H. (2019). Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi. *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*, 79–

85.

- Ratnamulyani, Beddy, I. A. (2018). The Role of Social Media In The Improvement of Selected Participation of Students Based on Students In Bogor Regency. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 154–161.
- Rohmayani, V., Arimutri, A. R. R., Lukiyono, Y. T., Nuzula, F., Romadhon, N., & Lihabi. (2021). Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, V(2), 165–173. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN/article/view/14360>.
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>.
- Syafiie, Inu Kencana. (2020). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Widiana Sari, S. N. (2018). Peranan Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Yogyakarta Dalam Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi the Role of Islamic Students Associations of Yogyakarta State University in Political Education in the University. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 234(2), 234–242. <https://hmiuny.wordpress.com/2016/05/2>.

## PROFIL PENULIS



### **Yuyun Fitriani, S.A.N., M.Si.**

Keterkaitan penulis dengan keilmuan politik dimulai saat penulis menjadi seorang dosen dan mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dan Sistem Politik Indonesia. Penulis menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Belitang dan lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2016. Dua tahun kemudian penulis memulai Pendidikan Magister pada Jurusan Magister Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Publik Universitas Lampung dan berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran di bidang politik dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional penulispun aktif sebagai peneliti di bidangnya. Beberapa penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain melakukan penelitian penulis juga memiliki ketertarikan untuk dapat menulis buku. *Book chapter* ini adalah buku kolaborasi pertama yang penulis hasilkan. Buku ini ditulis dengan harapan sepenuhnya agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca, bangsa dan negara.

Email Penulis: [yuyunfitriani01.yf@gmail.com](mailto:yuyunfitriani01.yf@gmail.com).

# PENDIDIKAN POLITIK

Pengenalan dasar dalam pendidikan politik mempunyai 2 (dua) makna relevan yang terdiri dari kata “pendidikan” dan “politik”. Elaborasi dalam pengertian pendidikan politik akan membutuhkan pendefinisian formal terhadap makna dari pendidikan dan politik secara benar dan proporsional. Pendidikan politik menurut seorang Aristoteles adalah usaha mendayagunakan kapasitas (*skills*) pribadi dalam meraih format kehidupan sosial secara penuh melalui interaksi politik bersama orang lain. Interaksi berlaku dalam konteks kelembagaan yang didesain untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial dan meraih tujuan negara. Istilah politik menggambarkan ranah kehidupan di mana politik dalam kehidupan akan berkaitan dengan berbagai aspek kewenangan yang terdiri dari negara, kekuasaan, penentuan keputusan, kebijakan, hingga distribusi lokasi atau daerah.

Buku ini terdiri dari sembilan bab, yaitu: bab pertama tentang Pengenalan dan Konsep Dasar Pendidikan, bab dua tentang Pendidikan Nasional dan Politik Pendidikan, bab tiga tentang Sejarah dan Dinamika Pendidikan Politik di Indonesia, bab empat tentang Landasan, Ruang Lingkup, dan Tujuan Pendidikan Politik, bab lima tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Z, bab enam tentang Kurikulum dan Materi Pendidikan Politik, bab tujuh tentang Struktur, Jalur, dan Model Pendidikan Politik, bab delapan tentang Tantangan dan Hambatan Pendidikan Politik, bab sembilan tentang Hakikat Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Perguruan Tinggi.